

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Jurnal, dan Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), 2002, *Standar Profesi Kurator dan Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Arikuno, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Atmajaya, Hendra, 2018, Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Putusan No.03/Pdt.Sus-Pkpu/2014/Pn Niaga.Mks), *Skripsi*, Tidak dipublikasikan, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.

Declercq, Peter J.M, 2002, *Netherlands Insolvency Law :The Netherlands Bankruptcy Act and The Most Important Legal Concepts*, Asser Press, Netherland

Fuady, Munir, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudargo Gautama, 1998, *Komentaris atas Peraturan Kepailitan Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gautama, Sudargo, 2008, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Kesatu*, PT. Alumni, Bandung.

Hardjaloka, Lonra, "Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingan dengan Instrumen Nasional di Beberapa Negara", *Jurnal Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 30, No. 3, Desember 2015, hlm. 385-412.

Herdiansyah, Haris, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta.

Hikmah, Mutiara, 2007, *Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, PT Refika Aditama, Bandung.

Ibrani, Yulius, 2008, Tinjauan Hukum Perdata Internasional Atas Putusan Perkara Kepailitan Badan Hukum Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia (Studi Kasus Putusan Mari No. 033K/N/2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 16/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst

dan Putusan Pengadilan Niaga No. 03/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst), Skripsi, Tidak dipublikasikan, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Juwana, Hikmahanto, 2004, *Relevansi Hukum Kepailitan Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

Kheriah, "Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 2, Januari 2015, hlm. 238-257.

Lontoh, Rudy, *et al.*, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

Lotulung, Paulus Effendi, 2001, *Pencocokan Piutang*, Alumni, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muljadi, Kartini, 2005, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik*, Prenada Media, Jakarta.

Nating, Imran, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberasan Harta Pailit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nuraini, Fadila Dias, 2016, Kedudukan Hukum Personal Guarantor yang Melepaskan Hak-Hak Istimewanya Dalam Kepailitan, *Skripsi*, Tidak dipublikasikan, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pramono, Nindy dan Sularto, 2017, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Pratama, Febry, 2012, Kepailitan Badan Hukum Asing yang Beroperasi di Indonesia (Studi Kasus Kepailitan Perusahaan Minyak dan Gas Berbadan Hukum Asing), *Skripsi*, Tidak dipublikasikan, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Pratama, Pandu Yudha, 2016, Pemilihan dan Pengangkatan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit pada Putusan Pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, *Tesis*, Tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

R. Suyatin, 1983, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sastrawidjaja, Man S, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

Shubhan, M. Hadi, 2009, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*, Kencana, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mammudji, Sri, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Bisnis*, Pusat Bahasa Depdiknas, Bandung.

Suryana, Daniel, 2006, Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia, *Tesis*, Tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Sunarmi, "Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan Dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst)", *USU Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 4, No. 4, Oktober 2016, hlm. 30-39.

Susanti, Eka Esti, 2010, Structured Creditors dalam Kepailitan (Studi Perbandingan Hukum Kepailitan Indonesia dan Belanda), *Tesis*, Tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sutopo, Ariesto Hadi dan Arief, Adrianus, 2010, *Terampil Mengolah Data*

*Kualitatif dengan NVIVO*, Prenada Media Group, Jakarta.

Suyudi, *et al.*, 2004, *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia*, Dimensi, Jakarta.

Tejaningsih, Titik, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, UII Press, Yogyakarta.

Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wijayanta, Tata, 2003, Relevansi Lembaga Dissenting Opinion Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Pengadilan Niaga, *Tesis*, Tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wijayanta, Tata, “Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Perniagaan Lain Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 20, No. 2, Juni 2008, hlm. 383-392.

Wijayanta, Tata, 2016, *Undang-undang dan Praktik Kepailitan Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Harahap, Yahya, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hikmah, Mutiara, 2007, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, PT Refika Aditama, Bandung.

Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan, 2002, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Cet.3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Staatsblad* 1847 - 23 tentang *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

*Staatsblad* 1847 - 23 tentang *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4443).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253

### **C. Website**

Winarto, Yudho, 2018, “Sepanjang 2018 Jumlah Perkara Kepailitan Melonjak”, <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2018-jumlah-perkara-kepailitan-melonjak?page=1>, diakses 29 Mei 2019.

### **D. Wawancara**

Jamaslin James Purba, 2019, Daya Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga Indonesia terhadap Aset Debitor yang Berada di Luar Wilayah Indonesia, *Wawancara*, Jakarta, 30 April.

M. Nior Islam, 2019, Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga di Luar wilayah Indonesia, *Wawancara*, Jakarta, 29 April.

Rikardo Simanjuntak, 2019, Masalah-masalah Aspek Internasional Dalam Hukum Kepailitan, *Wawancara*, Jakarta, 29 April.

Titik Tejaningsih, 2019, Daya Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga Indonesia terhadap Aset Debitor yang Berada di Luar Wilayah Indonesia, *Wawancara*, Jakarta, 29 April.